

Vidya Wertta Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

**AKTUALISASI PANCASILA DALAM
BUDAYA MASYARAKAT BALI AGA
(Studi di Desa Cempaga dan Pedawa, Buleleng, Bali)**

I Gusti Agung Paramita

paramita@unhi.ac.id

**Prodi Ilmu Filsafat Hindu
Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya
Universitas Hindu Indonesia Denpasar**

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang aktualisasi Pancasila dalam budaya masyarakat Bali Aga khususnya di dua desa yakni Desa Cempaga dan Pedawa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga yakni observasi, wawancara mendalam dengan para tokoh adat dan agama, dan studi dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, lalu dituliskan menjadi laporan penelitian. Berdasarkan penelitian di lapangan, didapatkan hasil yakni bahwa budaya masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga dan Pedawa sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi dua sila dari Pancasila dalam masyarakat di Desa Cempaga yakni sila tentang *kerakyatan* dan *keadilan sosial*. Masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga menerjemahkan prinsip kerakyatan dalam kehidupan keseharian. Bentuk aktualisasi nilai Pancasila dalam budaya masyarakat Desa Pedawa juga tidak jauh berbeda dengan Desa Cempaga. Khususnya yang berhubungan dengan musyawarah mufakat dan sikap gotong royong yang merupakan wujud dari Eka Sila Bung Karno. Dalam kehidupan sosio-kultural di Desa

Pedawa, prinsip-prinsip pemusyawaratan dijunjung tinggi. Mereka akan bermusyawarah ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan keagamaan—apalagi berhubungan dengan pengambilan keputusan penting di desanya.

Kata kunci: Aktualisasi, Nilai, Pancasila

ABSTRACT

This article discusses the actualization of Pancasila in the culture of the Bali Aga people, especially in two villages, namely Cempaga and Pedawa Villages. This research is a qualitative research. Data collection techniques are divided into three, namely observation, in-depth interviews with traditional and religious leaders, and study of documents related to research. After the data is collected, a qualitative descriptive analysis will be carried out, then written into a research report. Based on research in the field, the results obtained are that the culture of the Bali Aga community in Cempaga and Pedawa villages is very relevant to the values of Pancasila. Actualization of the two principles of Pancasila in the community in Cempaga Village, namely the principles of populist and social justice. The people of Bali Aga in Cempaga Village interpret the principles of democracy in their daily life. The actualization form of Pancasila values in the culture of the Pedawa Village community is also not much different from Cempaga Village. Especially those related to consensus agreement and mutual cooperation which is the manifestation of Eka Sila Bung Karno. In the socio-cultural life in Pedawa Village, the principles of deliberation are upheld. They will hold meetings when there are social, cultural and religious activities — especially when it comes to making important decisions in their village.

Keywords: Actualization, Value, Pancasila

I. PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun terakhir isu-isu tentang Pancasila mengemuka menjadi isu publik. Hal ini didasari atas munculnya gerakan-gerakan yang

dianggap anti Pancasila. Memang, selama ini pembudayaan nilai Pancasila belum begitu banyak dilakukan. Banyak masyarakat Indonesia yang hafal tentang Pancasila, namun tidak melaksanakan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik. Begitu juga sebaliknya, anak-anak muda—jangankan mengaktualisasikan nilai Pancasila, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila pun mereka tidak hafal. Ini problem serius yang dihadapi bangsa Indonesia.

Studi-studi tentang Pancasila selama ini juga lebih banyak menempatkan Negara sebagai subyek Pancasila, sementara masyarakat, termasuk masyarakat adat sebagai obyek yang mesti di Pancasilakan. Padahal, masyarakat adat sudah ada sebelum bangsa Indonesia ini terbentuk. Masyarakat adat memiliki sistem nilai dan kulturalnya sendiri. Jika ditelusuri historis dari pemikiran Pancasila, memang perlu digali dari kedalaman adat dan budaya masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia sudah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam budaya, religi dan kearifan lokal mereka jauh sebelum rumusan Pancasila menjadi dasar negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro (dalam Sutrisno, 2006:6) bahwa bangsa Indonesia berpancasila dalam “Tripakara”, yakni dalam adat istiadat, dalam budaya, keagamaan dan dalam kenegaraan.

Sebagaimana diafirmasi Riyanto (2015: 13) dalam *Buku Kearifan Lokal dan Pancasila*, kearifan lokal bangsa adalah “akar” dari Pancasila, sekaligus pohon yang kokoh rimbun penuh dengan dahan-dahan dan dedaunan lebat yang di dalamnya berlindung kupu-kupu indah dan aneka burung rupawan. Jadi kearifan lokal tersembunyi dalam tradisi hidup sehari-hari, dalam mitologi, dalam sastra yang indah, dalam bentuk-bentuk ritual penghormatan, atau upacara adat, dalam wujud nilai-nilai simbolik wujud rumah, dalam bahasa dan kebudayaan kesenian, dan dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam artikel ini penulis berupaya menelusuri “akar” Pancasila dengan melihat pada aktivitas budaya, adat dan agama masyarakat Bali Aga di dua Desa yakni Desa Cempaga dan Pedawa. Asumsinya adalah bahwa sebenarnya masyarakat di dua desa ini sudah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila—dalam arti yang luas—dalam kehidupan keseharian mereka, sebelum mereka mengenal rumusan tentang Pancasila sebagai dasar pembentukan bangsa Indonesia. Studi ini penting dilakukan untuk

melihat korelasi nilai Pancasila dengan keberadaan masyarakat adat dan sistem nilainya khususnya di Bali.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang secara umum didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, simbol, dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di daerah Bali, khususnya di dua desa yakni Desa Cempaga dan Pedawa. Penulis sudah pernah menjajagi dan membaca refesensi tentang dua desa ini, menggali kearifan lokal dan pandangan hidup masyarakat yang sangat relevan dengan nilai Pancasila.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk dapat mengamati secara langsung aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Dengan melakukan pengamatan di lapangan dalam waktu yang cukup lama diharapkan dapat diperoleh data yang lebih bersifat natural artinya, data atau perilaku yang tidak dibuat-buat karena diketahui ada kegiatan penelitian.

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu informan. Melalui wawancara mendalam diharapkan perolehan data terutama menyangkut *world-view* masyarakat terkait dengan Pancasila. Untuk menuntun wawancara dibuatkan pedoman wawancara. Studi dokumen dalam hal ini difokuskan pada dokumen baik berupa foto maupun dokumen-dokumen lain serta tulisan-tulisan terkait dengan aktualisasi nilai Pancasila.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Aktualisasi Pancasila dalam Budaya Masyarakat Desa Cempaga

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa peneliti berupaya memotret aktivitas sosio-kultural dan religi masyarakat Bali Aga di Cempaga yang memang sarat akan nilai Pancasila. Setidaknya ini

menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya di Desa Bali Aga, sudah mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam ranah adat, agama dan budaya mereka. Bisa dikatakan, mereka mengamalkan nilai Pancasila jauh sebelum Pancasila menjadi dasar Negara Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai Pancasila bisa digali di dalam kearifan lokal dan budaya masyarakat di Indonesia. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memaparkan aktualisasi dua sila dari Pancasila dalam masyarakat di Desa Cempaga yakni sila tentang *kerakyatan* dan *keadilan sosial*.

Menurut Riyanto (2015: 38), dalam kearifan lokal, konsep *kerakyatan* lebih cenderung pada subyek kehidupan yang arif dan bijaksana. Dalam pengertian *kerakyatan* tersembunyi pula makna kebijaksanaan dan kearifan. Konsep *kerakyatan* juga berhubungan dengan “tata damai” hidup masyarakat, bukan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keputusan rakyat. Tata damai dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia merupakan produk dari relasi sehari-hari.

Begitu juga musyawarah dan mufakat dalam kearifan lokal tidak hanya berdiskusi atau perjumpaan formal dalam rapat penentuan kebijakan publik. Nilai musyawarah dan mufakat merupakan mili kehidupan keseharian masyarakat. Artinya prinsip musyawarah mufakat bukan hanya berada pada tatanan verbal semata, melainkan juga kehidupan nyata dan faktual untuk masa depan yang lebih baik.

Berangkat dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga menerjemahkan prinsip kerakyatan dalam kehidupan keseharian. Di dalam kerakyatan ini, terkandung juga prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan tata kehidupan adat, budaya, dan agama di Desa Cempaga. Hal ini teraktual ketika masyarakat Cempaga melakukan *sangkepan*—pertemuan dalam skala kecil yang dilakukan setiap bulan.

Biasanya *sangkepan* ini dilakukan dengan beberapa topik pertemuan seperti misalnya kegiatan masyarakat *mayah dedosan*—berhubungan dengan iuran desa yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial, budaya dan keagamaan. Tidak hanya itu, kegiatan *sangkep* juga dilakukan ketika desa akan mengadakan kegiatan *Saba* atau upacara keagamaan. *Sangkepan* ini dipimpin oleh seorang *Ulun Desa* yang terdiri dari 1) *baan*

kenawan, 2) baan kekehe, 3) takin kenawan, 4) takin kekehe, 5) keban/pangenter, dan 6) panglunduan/juru getek.

Dalam proses *sangkepan* yang dipimpin oleh *Ulu Desa*, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, atau hanya mengikuti keinginan subyektif *Ulu Desa*, melainkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara *krama desa*. Misalnya saja sebelum mengawali upacara Saba, *Ulu Desa* biasanya melaksanakan tugasnya melakukan pengecekan terkait keberadaan pura di Desa Cempaga.

Ketika dalam proses pengecekan pura ada bangunan yang mesti diperbaiki atau direhab, maka keputusan perehaban bangunan itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam *sangkepan* desa. *Krama desa* diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah dan dialog untuk menemukan satu keputusan yang akan dijalankan bersama. Hal ini disampaikan seorang narasumber dari Cempaga yang bernama I Putu Mangku sebagai berikut:

”Kami di Desa Cempaga melaksanakan kegiatan berdasarkan musyawarah mufakat. Apalagi yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan di tingkat desa. Biasanya kegiatan musyawarah dilakukan menjelang akan melaksanakan kegiatan Saba, diawali dengan *Ulu* melaksanakan tugasnya untuk melihat bangunan pura kemudian apabila hal-hal yang harus diperbaiki maka dalam pelaksanaan musyawarah dicetuskan biasanya dicetuskan dalam *sangkep*. Ketika musyawarah dalam *sangkep* sudah diputuskan untuk melakukan perehaban dan disetujui oleh masyarakat, baru akan dilaksanakan perehaban. Jadi pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat bersama”. (Wawancara 19/07/2020).

Perihal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain, yakni I Gede Budiarta tokoh masyarakat di Desa Cempaga sebagai berikut:

“Musyawarah tentunya dilakukan setiap bulan yang disebut dengan *sangkep*. Biasanya ini dilakukan berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan seperti *mayah dedosan*, atau bayar iuran tetapi kalau untuk kegiatan yadnya biasanya dilakukan paruman yang

dipimpin oleh *Ulu* yang dilaksanakan setiap akan melaksanakan upacara atau nemu gelang tadi. Kalau sangkep insidental juga dilakukan jika ada kegiatan yang sifatnya mendesak dan terpaksa (Wawancara 19/07/2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam tata sosial dan keagamaan di Desa Cempaga didasarkan pada pertemuan atau *sangkepan*. Meskipun di dalam sistem pemerintahan desa dipimpin oleh *Ulu Desa*, namun dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama, mereka tetap melakukan musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Mereka selalu dituntun oleh spirit bernama “kebijaksanaan” dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sosial dan keagamaan. Karena tujuan mereka melakukan *sangkepan*—khususnya untuk kegiatan *Saba*—adalah untuk harmonisasi baik itu antara manusia, Tuhan maupun alam semesta. Hal ini bisa kita lihat dari pelaksanaan aktivitas *Saba* di Desa Cempaga. Di sini antara prinsip kerakyatan, ketuhanan, dan keadilan sosial mewujudkan dalam rentetan upacara *Saba* tersebut. Kerakyatan dalam konteks pengelolaan kekuatan masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan, sementara Ketuhanan ditunjukkan dalam wujud *sradha* dan *bhakti* mereka, dan keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk kesesuaian antara hak dan kewajiban yang mereka dapatkan.

Pandangan tentang keadilan di Desa Cempaga bisa dilihat dari kepemimpinan di dalam sistem pemerintahan desa adat. Kepengurusan di dalam sistem pemerintahan desa adat ditentukan berdasarkan *ririgan* (urutan) dan senioritas perkawinan atau di dalam bahasa mereka sebagai *ulu apad*. Artinya struktur kepemimpinan desa pakraman ditentukan atas dasar keseniorannya berdasarkan atas catatan waktu perkawinan mereka. Setiap anggota masyarakat yang telah menikah, secara berjenjang nantinya pasti akan sampai pada struktur kepengurusan desa pakraman. Setiap masyarakat akan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menempati posisi di dalam struktur pemerintahan desa adat ini. Ini menarik jika dilihat dari prinsip atau nilai-nilai keadilan. Artinya ”keadilan” bagi masyarakat Cempaga ketika semua masyarakat memiliki

kesempatan yang sama untuk *ngayah*—perbuatan yang dilakukan dengan tulus ikhlas—di dalam *keprajuruan* desa mereka.

Selain itu, prinsip kerakyatan dan keadilan sosial bisa dilihat dalam kegiatan atau rentetan upacara Saba Kuningan di Desa Cempaga. Rentetan Sabha Kuningan ini meliputi persiapan upacara, puncak upacara dan penutup. Pada persiapan upacara Saba Kuningan ini seluruh kekuatan masyarakat digunakan, termasuk sekaa teruna atau anak-anak muda di desa tersebut. Mereka mengawali kegiatan dengan *ngayah*, membersihkan lingkungan pura dan desa, setelah itu berburu binatang Kijang, selanjutnya mengerahkan masyarakat untuk *mebat* (mengolah daging buruan yang digunakan untuk keperluan upacara ritual).

Bila memperoleh kijang betina diolah menjadi berabagai jenis makanan seperti *jajeruk*, *gagecok*, *urab putih*, *timbangan*. Bila yang diperoleh kijang jantan diolah sebagaimana jenis olahan kijang betina, namun ditambah dengan olahan berupa sate. Olahan dimaksud ditempatkan di samping olahan makanan yang berbahan babi. Bila memperoleh kijang jantan dalam perburuan, upacara kuningan tersebut diperpanjang perayaannya yang disebut dengan *Naksuin*.

Setelah mengolah hasil buruan, mereka dikoordinir oleh seorang yang bernama *sayan desa*—seorang yang bertugas mengkoordinir masyarakat untuk segala aktivitas dalam Saba Kuningan. Cara *sayan desa* menyebarkan informasi pun menarik, yakni dengan memegang tampul *bale gede* lalu mengeluarkan kata-kata yang bernada ajakan untuk gotong royong. Misalnya *desa pesu jaja nasi*, *desa pesu mebat* yang artinya desa mengeluarkan jajanan dan nasi, desa keluar untuk membuat olahan daging buruan. Menariknya, masyarakat dengan penuh kegairahan mengikuti apapun komando yang dikeluarkan oleh *sayan desa* ini.

Setelah selesai membuat olahan, mereka akan membersihkan alat-alat yang digunakan untuk menabuh dan membersihkan segala jenis peralatan yang digunakan untuk upacara ritual Saba Kuningan. Para seniman seperti penabuh dan penari dibeirikan kesempatan untuk latihan untuk menyambut para dewa yang akan turun ketika upacara dilaksanakan. Selanjutnya, setelah olahan makanan sudah tersedia, maka *sayan desa* kembali memanggil *krama desa* dan *krama teruna* untuk mengambil hak mereka berupa *lawar atanding*.

Di sini ada yang menarik bahwa dalam rangkaian persiapan upacara Saba Kuningan, masyarakat di Desa Cempaga diminta untuk menjalankan kewajiban dan dipenuhi hak-haknya setelah selesai melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak hanya *lawar atanding*, masyarakat juga dipersilakan mengambil makanan yang sudah disediakan. Pada puncak upacara dan penutup, mereka benar-benar guyub memuja para dewa melalui tarian dan tetabuhan, begitu juga upacara ritual.

Jika dicermati rentetan upacara Saba di atas, kita bisa melihat sebuah rangkaian kegiatan yang terpola dengan memberdayakan seluruh kekuatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kerakyatan bagi masyarakat Desa Cempaga adalah sikap gotong royong dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosial dan religi. Mereka dikoordinir oleh *sayan desa* untuk melaksanakan setiap rentetan upacara. Setelah masyarakat di Desa Cempaga melaksanakan kewajiban mereka, maka mereka dipersilakan untuk mengambil haknya berupa makanan. Ini tidak hanya berlaku bagi kaum dewasa saja, melainkan juga untuk generasi muda di Desa Cempaga yang mereka sebut sebagai *krama taruna*. Berangkat dari pengamatan tersebut, bisa dijelaskan bahwa masyarakat Cempaga memiliki prinsip dan nilai Pancasila dalam tata kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

3.2 Bentuk Aktualisasi Pancasila dalam Budaya Masyarakat Desa Pedawa

Bentuk aktualisasi nilai Pancasila dalam budaya masyarakat Desa Pedawa juga tidak jauh berbeda dengan Desa Cempaga. Khususnya yang berhubungan dengan musyawarah mufakat dan sikap gotong royong yang merupakan wujud dari Eka Sila Bung Karno. Dalam kehidupan sosio-kultural di Desa Pedawa, prinsip-prinsip pemusyawaratan dijunjung tinggi. Mereka akan bermusyawarah ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan keagamaan—apalagi berhubungan dengan pengambilan keputusan penting di desanya.

Sebagaimana disampaikan tokoh masyarakat Pedawa yakni I Ketut Belgi bahwa musyawarah dilakukan setiap akan melaksanakan kegiatan di desa. Kegiatan bermusyawarah ini disebut dengan istilah *sangkep*. Ada berbagai jenis sangkep, ada yang sudah terjadwal, ada juga yang incidental. Biasanya sangkep yang tidak terjadwal ini dilakukan apabila

ada kejadian-kejadian mendadak dan desa harus memutuskan sesuatu. Berikut kutipan wawancaranya.

“Di Desa Pedawa prinsip pemusyawaratan memang dijunjung tinggi. Keputusan desa diambil dengan jalan bermusyawarah agar mencapai kata mufakat. Kegiatan musyawarah di sini disebut *sangkep*. Ada sangkep yang terjadwal, tetapi ada juga yang tidak dijadwalkan, atau ketika ada persoalan yang menuntut segera ada solusi. Di sini peran Ulun Desa, Tugu, yakni pimpinan desa sangat penting dalam upaya bermusyawarah dengan masyarakat. Sangkep yang bersifat incidental dilakukan ketika terjadi mara bahaya di desa dan bencana. Apapun yang menjadi keputusan desa tetap ditempuh dengan jalan musyawarah”. (Wawancara 20/07/2020).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas bisa dijelaskan bahwa pengambilan keputusan penting di desa, meskipun dalam konteks kebencanaan yang sifatnya mendadak, tetap diputuskan berdasarkan prinsip permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Di sini peran Ulun Desa sebagai pimpinan tradisional sangat penting karena dianggap mewakili “kebijaksanaan” dalam kepemimpinannya. Ulun Desa akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari *sangkepan* tersebut. Tidak hanya berhubungan dengan persoalan insidental kebencanaan, dalam kegiatan-kegiatan agama dan budaya pun, kegiatan sangkep tetap dilakukan.

Menurut tokoh Desa Pedawa yang lain seperti I Kadek Satria, pengambilan keputusan di Desa Pedawa didasarkan pada semangat bermusyawarah. Banyak jenis kegiatan bermusyawarah di Desa Pedawa yang didasarkan pada runtutan kegiatan. Ada yang namanya *sangkep desa* (musyawarah yang diadakan di tingkat desa), ada *sangkep Bungan tahun*, *sangkep sari*, *sangkep ketipat* yang dilakukan dengan *lelintih nemu gelang* yakni sebuah siklus lima tahunan yang berisi aktivitas keagamaan.

Sangkep Bungan tahun ini berhubungan dengan rapat karma ngarep yang dalam setiap pertemuannya setiap karma membawa sarin tahun. Krama di sini dibagi dalam nomor *tata lungguh* atau nomor induk perkawinan. Dalam rapat ini mereka membahas tentang rangkaian upacara

ritual yang disebut Sabha, peraturan desa yang disebut *awig-awig* yang perlu disempurnakan. Sementara sangkep ketipat adalah rapat yang dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan upacara ritual.

Apabila ada persoalan yang harus diselesaikan secara darurat, maka seorang Tugu atau Bendesa, sejenis pimpinan desa, dan *sangket* (kepala desa) akan mengeluarkan *pakebah* atau musyawarah darurat yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Desa. Artinya dalam keadaan darurat pun masyarakat di Desa Pedawa tetap mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Berikut kutipan wawancara dengan Kadek Satria, tokoh agama di Desa Pedawa.

“Musyawarah dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya ketika akan ada keputusan yang berhubungan dengan sosial, budaya dan agama di Desa, selalu dikerjakan dengan mengambil sikap musyawarah terlebih dahulu di antaranya ada yang disebut dengan *sangkep desa*, *sangkep Bungan taun*, *sangkep sari*, *sangkep ketipat* dilakukan dengan *lelintih nemu gelang* (yaitu siklus 5 tahunan), jika berjalan dengan baik, jika tidak maka dilaksanakan dengan 6 tahun sekali. Apabila dalam situasi darurat berdasarkan keputusan *tugu* (bendesa) dan *sangket* (kepala desa) dengan mengeluarkan *pekebah* darurat. (Wawancara 19/07/2020).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa prinsip musyawarah mufakat menjadi basis dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Mereka menganggap bahwa keputusan yang menyangkut situasi dan kondisi di desa, mesti diambil melalui kesepakatan bersama. Meskipun ada jajaran kepemimpinan di desa, baik itu kepemimpinan tradisional maupun administratif, fungsinya mempertahankan kehidupan bersama yang harmonis di desa, baik itu secara *sekala* maupun *niskala*. Kebijakan di tingkat desa diambil dengan pola komunikasi komunal, tidak hanya di bidang sosial dan budaya saja, melainkan juga keagamaan.

Hal ini juga tercermin dalam pelaksanaan siklus yang mereka sebut *Lelintih Nemu Gelang*. Wayan Sukrata seorang tokoh intelektual di Pedawa menjelaskan bahwa *Lelintih Nemu Gelang* ini adalah peredaran waktu sampai kembali lagi pada saat semula. Hal ini berhubungan dengan rangkaian kegiatan di Desa Adat Pedawa, dari awal sampai akhir dan

kembali lagi seperti semula. Adapun kegiatan tersebut meliputi *sabha*, *sangkep*, *muga*. *Sabha* di sini dimaksudkan untuk upacara ritual yang dilaksanakan di pura atau tempat suci yang ada di Pedawa, sementara *sangkep* adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan, dan terakhir *Muga* adalah sebuah ritus mempersembahkan makanan kepada para dewa atau bhatara di Desa Pedawa.

Siklus *Lelintih Nemu Gelang* ini menjadi ciri khas tradisi masyarakat Pedawa. Dalam siklus ini terdapat kegiatan sosial, budaya dan keagamaan yang sangat guyub dan komunal. Semua masyarakat terlibat dalam aktivitas ini, termasuk para generasi muda. Rangkaian upacara *Sabha* misalnya, dilakukan dengan pola gotong royong dan pembagian tugas kepada masyarakat.

Mereka akan dikoordinir oleh pimpinan desa untuk melaksanakan setiap kegiatan tersebut. Bisa dikatakan, prinsip gotong royong sangat kentara dalam pelaksanaan *sabha*. Peran lembaga adat sangat kuat di sini untuk memobilisasi karma atau anggotanya. Bahkan kekuatan pimpinan adat lebih kuat dalam memobilisasi masyarakat daripada pimpinan di lembaga-lembaga dinas atau lembaga formal.

Berdasarkan wawancara dengan Ketut Rostika, semangat gotong royong di Desa Pedawa diwarisi secara turun temurun. Mereka memegang teguh nilai Tri Hita Karanga yakni hubungan yang harmonis antara Tuhan, Lingkungan alam dan sesama manusia. Harmonisasi baik secara makro dan mikro menjadi cita-cita masyarakat di Desa Pedawa. Apabila ada yang tidak harmonis, mereka akan berupaya membuat keadaan menjadi stabil dan seimbang baik melalui kegiatan sosial maupun keagamaan.

Semangat gotong royong dalam kesosialan masyarakat di Desa Cempaga juga bisa dilihat dari pembentukan sub kelompok sosial yang mereka sebut dengan istilah *sekaa*. *Sekaa* ini memiliki hak dan kewajiban berdasarkan pembagian wilayah tugas mereka. Ada yang namanya *sekaa sambangan* yang memiliki wilayah tugas di *parahyangan*, sedangkan gotong royong di tingkat *pawongan* dan *palemahan* dilakukan berdasarkan *Yos*—yakni kelompok keluarga, tempek dan kamling.

Tidak hanya itu, di Desa Pedawa juga terdapat kelompok *sekaa* yang berhubungan dengan aktivitas kesenian seperti *sekaa tabuh*, *sekaa gegitan*, dan *sekaa-sekaa* yang lain. Ini menunjukkan bahwa tipologi masyarakat di Pedawa bersifat komunal dengan prinsip gotong royong dan *menyama*

braya yang cukup kuat. Mereka selalu menjaga hubungan yang harmonis antar sesama/*pawongan*. Segala jenis pelaksanaan kegiatan di tingkat desa pun diselesaikan dengan semangat gotong royong tersebut. Artinya, masyarakat Pedawa sudah menerapkan *Eka Sila* jauh sebelum mereka mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila. Semangat gotong royong bahkan telah dilaksanakan sampai saat ini, meskipun Desa Pedawa terkena dampak perkembangan teknologi dan informasi sebagai konsekuensi modernitas.

3.3 Respon Masyarakat Desa Cempaga dan Pedawa Terhadap Pancasila

Masyarakat di dua Desa Bali Aga baik itu Desa Cempaga maupun Pedawa meyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila masih relevan dengan tradisi, adat dan budaya yang telah diwarisi secara turun-temurun. Antara Pancasila dan pandangan dunia masyarakat dua desa ini pun dianggap saling berkorelasi, karena memang Pancasila merupakan nilai yang digali dari kedalaman budaya dan adat masyarakat di Indonesia. Bahkan masyarakat meyakini, tidak ada perbedaan signifikan antara tradisi dan kehidupan religius mereka dengan nilai Pancasila yang selama ini menjadi dasar dan falsafah bernegara.

Sebagaimana disampaikan oleh tokoh di Desa Pedawa bernama I Ketut Belgi, bahwa tidak ada pertentangan antara nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan budaya yang selama ini dijalankan di Desa Pedawa—aturan berupa *awig-awig* yang mengikat krama desa Pedawa pun dibuat sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini artinya, Pancasila memang digali dari tradisi dan budaya yang hidup di tanah Indonesia sehingga pelaksanaannya sangat relevan dengan budaya masyarakat di Desa Pedawa.

Respon tentang hubungan Pancasila, adat dan tradisi di Desa Bali Aga juga disampaikan oleh tokoh sekaligus akademisi dari Desa Pedawa yakni di Kadek Satria. Menurutnya, Pancasila di Desa Pedawa tidak hanya dipahami oleh masyarakatnya, melainkan juga dilaksanakan. Pancasila tidak menjadi doktrin, tetapi sudah menjadi sebuah laku hidup yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pedawa. Berikut kutipan wawancaranya.

“Pancasila di Desa Pedawa tidak dipahami akan tetapi dilaksanakan. Pancasila tidak menjadi doktrin tetapi menjadi sebuah perilaku yang dilaksanakan oleh masyarakat Pedawa karena Pancasila merupakan laku hidup bagi masyarakat Pedawa sendiri. Pandangan hidup dan keyakinan masyarakat di Desa Pedawa pun sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya rasa relevansi ini menunjukkan bahwa Pancasila memang digali dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini ajaran yang original dari masyarakat Indonesia”. (Wawancara 19/07/2020).

Respon yang sama juga disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Cempaga, salah satunya adalah I Putu Mangku. Dirinya bahkan menyampaikan selama ini nilai Pancasila masih sangat cocok dengan tradisi, adat dan budaya masyarakat di Desa Cempaga. Tidak ada pertentangan nilai di dalamnya, karena apa yang terkandung di dalam Pancasila, juga kami laksanakan di Cempaga, meskipun masyarakat Cempaga tidak semua paham dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya, masyarakat di Desa Cempaga sudah berpancasila di dalam adat dan budaya mereka. Pandangan hidup mereka juga merepresentasikan dan mengaktualisasikan nilai dari Pancasila tersebut.

Bahkan I Putu Mangku menyatakan, kalau nilai Pancasila diganti dengan ideologi yang lain, bisa jadi justru tidak relevan dengan nilai dan budaya yang selama ini dijalankan di Desa Cempaga. Berikut kutipan wawancaranya.

“Saat ini Pancasila masih cocok dengan adat, budaya yang kami laksanakan di Desa Cempaga. Meskipun adat dan budaya kami tergolong kuno dan warisan leluhur, tapi ternyata memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya kami sudah menerapkan Pancasila jauh sebelum dijadikan dasar Negara. Justru seandainya ideologi itu diganti dengan yang lain, belum tentu cocok dengan kehidupan dan budaya kami di Cempaga. Saya rasa Pancasila sudah mewakili adat, budaya dan religi kami di Desa Cempaga”. (Wawancara 19/07/2020).

Tidak hanya I Putu Mangku saja, tokoh Desa Cempaga yang lain yakni I Gede Budiarta menyampaikan hal yang sama bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat cocok dengan pandangan hidup masyarakat di Desa Cempaga. Misalnya saja sila persatuan sangat melekat di dalam kehidupan sosial masyarakat di Cempaga. Mereka mengedepankan persatuan sosial untuk keharmonisan baik itu *bhuana alit* maupun *bhuana agung*. Dalam setiap aktivitas baik itu sosial, budaya dan keagamaan mereka mengedepankan persatuan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas tersebut. Berangkat dari sinilah, masyarakat Cempaga meyakini jika Pancasila menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tidak hanya itu, masyarakat Cempaga juga mengedepankan gotong royong dalam setiap pelaksanaan upacara agama. Mereka menyadari dengan gotong royong semua persoalan dan kegiatan di Desa Cempaga bisa terlaksana dengan baik. Melalui gotong royong pula solidaritas sosial akan terus terjaga dengan baik.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga dan Pedawa sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi dua sila dari Pancasila dalam masyarakat di Desa Cempaga yakni sila tentang *kerakyatan* dan *keadilan sosial*. Masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga menerjemahkan prinsip kerakyatan dalam kehidupan keseharian. Bentuk aktualisasi nilai Pancasila dalam budaya masyarakat Desa Pedawa juga tidak jauh berbeda dengan Desa Cempaga. Khususnya yang berhubungan dengan musyawarah mufakat dan sikap gotong royong yang merupakan wujud dari Eka Sila Bung Karno. Dalam kehidupan sosio-kultural di Desa Pedawa, prinsip-prinsip pemusyawaratan dijunjung tinggi. Mereka akan bermusyawarah ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan keagamaan—apalagi berhubungan dengan pengambilan keputusan penting di desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Astra, Semadi I Gde. 1997. *Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII*. Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bakker, SJ. 1984. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budi Utama, I Wayan. 2011. *Adaptasi budaya Masyarakat Bali Aga di desa Cempaga Kabupaten Buleleng dalam Merespon Regulasi Negara dalam Bidang Agama*. Disertasi: Denpasar: Universitas Udayana.
- Dwipayana, AA GN Ari. *Melewati Benteng Ajeg Bali*. Pengantar untuk Buku Henk Schulte Nordholt, Bali: Benteng Terbuka 1955-2005, 2010.
- , 2005. *Globalism. Pergulatan politik Representasi atas Bali*. Uluangkep.
- Notonagoro. 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Dhakarta: Patjuran Tudjuh.
- Nordholt, Henk Schulte. 2010. *Bali Benteng Terbuka*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Paramita, I Gusti Agung. 2015. *Wacana Kebudayaan dalam Dinamika Pers di Arena Politik Lokal*. Tesis di Program Studi Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.
- Paramita, I Gusti Agung. 2016. *Air, Puisi dan Industri*, terbit dalam Buku *Air, Tradisi dan Industri* (ed) I Wayan Budi Utama. Denpasar: Pustaka Ekspresi bekerjasama dengan Pascasarjana Unhi Denpasar.
- Pranarka, A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Riyanto, Armada dkk. 2015. *Kearifan Lokal-Pancasila: Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sudiarja, A. dkk. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Suharja, Arya. 2017. *Bali Mandara: Estafeta untuk Generasi Muda*. Denpasar: Bappeda Litbang Provinsi Bali

Suryawan, I Ngurah. 2010. *Genealogi Kekerasan dan Pergilakan Subaltern*. Jakarta: Predana.

Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

JURNAL ILMIAH

http://www.dharmasmrti.com/index.php/jurnal_agama/article/view/96